



WALI KOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAREPARE  
NOMOR 636 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
TAHUN 2025

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa usulan rancangan Peraturan Wali Kota yang belum terakomodasi dalam Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Parepare Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Wali Kota Nomor 485 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Parepare Tahun 2025, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Parepare Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang .....

KEPUTUSAN WALI KOTA PAREPARE  
NOMOR : 636 TAHUN 2025  
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2025

-2-

3. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
6. Peraturan Walikota Parepare Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 58);
7. Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Parepare Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Wali Kota Nomor 485 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Parepare Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA PAREPARE TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Ketiga atas Keputusan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Parepare Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun oleh Perangkat Daerah Kota Parepare dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Parepare untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Wali Kota.

KETIGA .....

KEPUTUSAN WALI KOTA PAREPARE  
NOMOR : 636 TAHUN 2025  
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2025

-3-

- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Parepare menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Wali Kota Parepare Tahun 2025 serta merupakan dasar Gubernur Sulawesi Selatan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk fasilitasi.
- KEEMPAT : Dalam hal tertentu dan mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran dapat dilakukan penambahan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 16 September 2025

WALI KOTA PAREPARE,

TASMING HAMID

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kota Parepare di Parepare; dan
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare di Parepare.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PAREPARE  
 NOMOR : 635 / W. K. P. 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI  
 KOTA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG  
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN WALI  
 KOTA PAREPARE TAHUN 2025

---

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA PAREPARE TAHUN 2025

NO	JUDUL PERWALI	INSTANSI
1	JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	BAGIAN HUKUM
2	RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN ATAS KOTA PAREPARE	DINAS PUPR
3	TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT dr. HASRI AINUN HABIBIE PAREPARE	RS. dr. HASRI AINUN HABIBIE
4	PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT dr. HASRI AINUN HABIBIE PAREPARE	RS. dr. HASRI AINUN HABIBIE
5	PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT dr. HASRI AINUN HABIBIE PAREPARE	RS. dr. HASRI AINUN HABIBIE
6	KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT dr. HASRI AINUN HABIBIE PAREPARE	RS. dr. HASRI AINUN HABIBIE
7	RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024-2025	BAGIAN PEMERINTAHAN
8	PERATURAN INTERNAL UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE	RSUD ANDI MAKKASAU
9	PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	RSUD ANDI MAKKASAU
10	REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, PEGAWAI DAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE	RSUD ANDI MAKKASAU
11	TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	RSUD ANDI MAKKASAU
12	TARIF PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU	RSUD ANDI MAKKASAU
13	PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL	DPMPSTP
14	PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK	DPMPSTP

15. PENYELENGGARAAN .....

15	PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA, TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA	DINAS PERDAGANGAN
16	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE	BKPSDMD
17	PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026	BKD
18	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) DAN ACQUIRED IMMUNO DEFICENCY SYNDROME (AIDS)	DINAS KESEHATAN
19	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TUBERKULOSIS	DINAS KESEHATAN
20	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MALARIA	DINAS KESEHATAN
21	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE	DINAS KESEHATAN
22	PENYELENGGARAAN IMUNISASI	DINAS KESEHATAN
23	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026	BAPPEDA
24	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025	BAPPEDA
25	STRATEGIS SANITASI KOTA TAHUN 2025	BAPPEDA
26	RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029	BAPPEDA
27	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026	BAPPEDA
28	RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH TAHUN 2025-2029	BAPPEDA
29	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN PEMBERANTASAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA	BADAN KESBANGPOL
30	PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTANG	BAGIAN ORGANISASI
31	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	BAGIAN ORGANISASI
32	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	BAGIAN ORGANISASI

33	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN	BAGIAN ORGANISASI
34	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	BAGIAN ORGANISASI
35	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	BAGIAN ORGANISASI
36	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	BAGIAN ORGANISASI
37	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	BAGIAN ORGANISASI
38	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	BAGIAN ORGANISASI
39	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PAREPARE NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	BAGIAN ORGANISASI
40	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PAREPARE NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	BAGIAN ORGANISASI
41	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	BAGIAN ORGANISASI
42	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PAREPARE NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA	BAGIAN ORGANISASI
43	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BAGIAN ORGANISASI
44	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	BAGIAN ORGANISASI
45	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI WALIKOTA	BAGIAN ORGANISASI

60	TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH	BKD
61	NILAI PEROLEHAN AIR TANAH	BKD
62	KEBIJAKAN ASURANSI BARANG MILIK DAERAH	BKD
63	PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	BAGIAN PEMERINTAHAN
64	PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERUMDA AIR MINUM TIRTA KARAJAE
65	TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH	BKD
66	TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH	BKD
67	NOMENKLATUR, KELAS DAN NILAI JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	BAGIAN ORGANISASI
68	NOMENKLATUR, KELAS DAN NILAI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	BAGIAN ORGANISASI
69	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	BKD
70	PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH OLEH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE	SEKRETARIAT DPRD
71	TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN KEPADA PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL	DINAS TENAGA KERJA
72	PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN DAERAH KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DPMPSTSP
73	ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE KOTA PAREPARE	PERUMDA AIR MINUM TIRTA KARAJAE
74	PENGENAAN SANKSI DENDA SERTA SANKSI LAINNYA BAGI PELANGGARAN DAN PENGGUNAAN SARANA PELAYANAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE KOTA PAREPARE	PERUMDA AIR MINUM TIRTA KARAJAE
75	PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PASIEN NON BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL	RSUD ANDI MAKKASAU
76	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN, ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR TEKNIS TAHUN ANGGARAN 2025	BKD

77	PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM KOTA PAREPARE	DINAS PERHUBUNGAN
78	RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029	BAGIAN PEMERINTAHAN
79	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PAREPARE NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE	BKPSDMD
80	STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH	BKD
81	TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH	BKD
82	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL	BKD
83	PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	BKD
84	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN, ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR TEKNIS TAHUN ANGGARAN 2025	BKD
85	STANDAR HARGA SATUAN, ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR TEKNIS TAHUN ANGGARAN 2026	BKD
86	PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	BKD
87	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	BKD
88	KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH	BKD
89	PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA PAREPARE	DINAS KESEHATAN

90	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF	BKD
91	PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH	DINAS TENAGA KERJA
92	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
93	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	BAGIAN PEMERINTAHAN
94	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE	SEKRETARIAT DPRD
95	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
96	PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI TINGKAT KOTA	DPMPSTP
97	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA	BAGIAN PEMERINTAHAN
98	TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PERJALANAN DINAS	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

WALI KOTA PAREPARE,

  
TASMING HAMID